

TESIS

**TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR YANG
DILAKUKAN OLEH KELOMPOK MASYARAKAT
YANG TINGGAL DIKAWASAN HUTAN DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**



Oleh :

**HOTNER SIAGIAN
NIM. 2120215310034**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2023

**TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR YANG
DILAKUKAN OLEH KELOMPOK MASYARAKAT
YANG TINGGAL DIKAWASAN HUTAN DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh :

**HOTNER SIAGIAN
NIM. 2120215310034**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2023

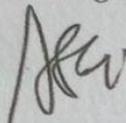
JUDUL : TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK MASYARAKAT YANG TINGGAL DIKAWASAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

NAMA : HOTNER SIAGIAN

NIM : 2120215310034

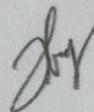
**Disetujui
Komisi Pembimbing,**

Pembimbing Utama



**Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

Pembimbing Pendamping

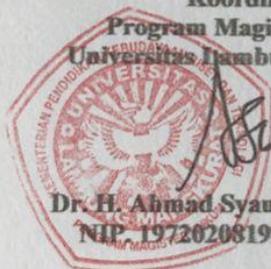


**Prof. Dr. Ifrani, SH., M.H.
NIP. 19810626200604 1 006**

Diketahui,

Koordinator

**Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



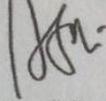
**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

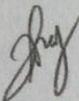
**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....**

Pembimbing Utama



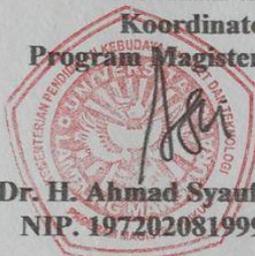
**Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

Pembimbing Pendamping



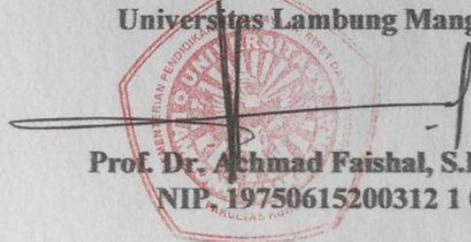
**Prof. Dr. Ifrani, SH., M.H.
NIP. 19810626200604 1 006**

**Disahkan oleh
Koordinator
Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hotner Siagian
NIM : 2120215310034
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Hotner Siagian
NIM. 2120215310034

SIAGIAN, HOTNER. 2023 “Tindak Pidana Pembalakan Liar Yang Dilakukan Oleh Kelompok Masyarakat Yang Tinggal Dikawasan Hutan Dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. 140 Halaman.

RINGKASAN

Sanksi administratif merupakan bagian penting dalam penegakan hukum, termasuk penegakan hukum lingkungan. Pada bagian akhir sebuah peraturan, biasanya dijelaskan beberapa jenis sanksi administratif bagi pelanggaran atas peraturan tersebut. Secara umum, sanksi dalam peraturan perundang-undangan termasuk juga sanksi administratif, biasanya dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban). Sanksi administratif berupa teguran/peringatan tertulis biasanya merupakan tahapan berikutnya apabila sudah diberikan sanksi administratif berupa teguran/peringatan lisan tetapi ternyata masih tetap diabaikan dan perbuatan yang dilanggar belum dilakukan perbaikan. Terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap kegiatan penambangan dikawasan hutan tanpa izin. Hal ini apabila ada badan hukum atau korporasi yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka badan hukum atau korporasi dapat dikenakan sanksi administratif.

Ketentuan sanksi ini, baik pidana, perdata, maupun administratif merupakan suatu pilihan, artinya tidak harus ketiga-tiganya diterapkan tetapi dapat dipilih mana yang paling efektif dan yang paling tepat dikaitkan dengan lingkup substansi pengaturannya. Dalam bagian penjelasan Pasal 50 A dan Pasal 80 UU Nomor 41 Tahun 1999 Jo UU Nomor UU 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan sebagaimana yang diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tidak

dijelaskan pengertian dan jenis sanksi administrasi yang dimaksud, hanya menyebutkan “cukup jelas” Kemudian dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, juga terdapat sejumlah pasal yang memberikan atau mengancam sanksi administrasi kepada pelaku pembalakan liar/Perusakan Hutan/illegal logging.

Dari ketentuan yang mengancam sanksi administrasi bagi Pelaku Pembalakan Liar yang Tinggal di Kawasan Hutan, yang terdapat dalam Pasal 50A UU Nomor 41 Tahun 1999 Jo UU Nomor UU 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, dan Pasal 12A, Pasal 17A, dan Pasal 110B UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka perlu dianalisis apa alasan atau dasar atau urgensi atau ratio legis pelaku pembalakan liar yang tinggal di kawasan hutan hanya diancam sanksi administrasi, yang sebelum diubah dengan Pasal 36 dan Pasal 37 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaku pembalakan liar yang tinggal di dalam atau di luar kawasan hutan diancam dengan pidana penjara dan denda. Bahkan pelaku pembalakan liar yang terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan; atau telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat, tidak mendapat sanksi administrasi lagi. Dapat dikatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya penambahan Pasal 50A UU Nomor 41 Tahun 1999 Jo UU Nomor UU 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, dan Pasal 12A, Pasal 17A, dan Pasal 110B UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak memiliki kejelasan tujuan adanya perubahan sanksi bagi pelaku pembalakan liar yang tinggal di kawasan hutan dari sanksi penjara dan denda ke sanksi administrasi.

Penggunaan sanksi pidana dalam penegakan aturan yang ada merupakan tuntutan sosial yang wajar mengingat kepentingan hukum yang harus dilindungi. Fungsi hukum pidana tidak hanya sekedar untuk mempertahankan dan melindungi nilai-nilai moral, tetapi telah bergeser ke arah pendekatan kemanfaatan (utilitarian approach) dan pada yang terakhir ini hukum pidana dan sanksi pidana dianggap merupakan salah satu dari sekian sarana yang oleh masyarakat dapat digunakan untuk melindungi dari perilaku yang membahayakan masyarakat tersebut.

Banyaknya undang-undang yang bersifat khusus memiliki konsekuensi terhadap perkembangan hukum pidana, karena undang-undang khusus tersebut pada satu bagiannya mengatur tentang ketentuan pidana. Produk legislasi yang pada awalnya dimaksudkan untuk keperluan birokrasi pemerintahan yang bercorak administrasi, pada gilirannya juga memerlukan bantuan hukum pidana dalam rangka penegakan terhadap berbagai bentuk pelanggarannya. Pada titik inilah bermula satu konsep tentang pidana administrasi, karena hukum pidana digunakan untuk membantu penegakan hukum administrasi diberbagai sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemberiaan sanksi bagi pelaku tindak pidana kehutanan harus memperhatikan aspek-aspek pidana itu sendiri untuk mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Tindak pidana di berbagai sektor kehutanan selain pengelolaan hutan secara illegal atau tanpa izin, seringkali berkaitan pada proses pemberian izin. Alasan utama diberikannya sanksi bagi pelaku pembalakan liar yang tinggal di hutan dan di diluar kawasan hutan dalam UU Nomor Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu agar tidak ada diskriminasi pengaturan ancaman perusakan hutan bagi pelaku pembalakan liar yang tinggal di dalam dan di luar kawasan hutan dan 2. Mengingat adanya dampak yang serius terhadap kerusakan lingkungan yang semakin parah, maka untuk mencapai kemanfaatan dan keadilan suatu aturan, sudah saatnya kedudukan sanksi pidana dalam tindak pidana kehutanan tidak lagi sebagai sanksi pamungkas atau upaya terakhir (*ultimum remedium*) tapi sebagai pilihan utama (*Premium Remedium*) dalam pemberian sanksi.

Di Indonesia regulasi mengenai kehutanan merupakan administrative penal law yaitu sebagai aturan administrasi yang memuat ketentuan pidana dalam penegakannya. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mengatur perluasan tindak pidana dibidang kehutanan mencakup kejahatan korporasi, perusakan hutan yang terorganisir, bahkan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemberi izin. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Perusakan Hutan, sanksi pidana perannya lebih fungsional (premium remedium) daripada sekedar bersifat subsidar (ultimum remedium) sebagaimana pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan menggunakan sanksi pidana sebagai premium remedium tersebut menciptakan kondisi yang lebih baik untuk penegakan hukum dibidang kehutanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, ketentuan pidana dibedakan berdasarkan unsur niatan (mens rea) pelaku. Lain halnya dengan korporasi tidak diatur mengenai perbedaan unsur mens rea dalam pidana tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dipertimbangan perbuatannya dilakukan dengan kesadaran penuh dengan sanksi pidana lebih berat.

SIAGIAN, HOTNER. 2023. “Tindak Pidana Pembalakan Liar Yang Dilakukan Oleh Kelompok Masyarakat Yang Tinggal Dikawasan Hutan Dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja”. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. 140 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Pidana, Pembalakan Liar, Undang-Undang Cipta Kerja.

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Tindak Pidana Pembalakan Liar Yang Dilakukan Oleh Kelompok Masyarakat Yang Tinggal Dikawasan Hutan Dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk mengetahui dan menganalisa landasan/urgensi pelaku pembalakan liar yang tinggal di kawasan hutan dikenakan sanksi administrasi serta untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan formulasi untuk menjerat pelaku pembalakan liar yang tinggal di kawasan hutan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan menganalisis peraturan perundang-undangan mengenai landasan/urgensi pelaku pembalakan liar yang tinggal di kawasan hutan dikenakan sanksi administrasi.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, Dalam Naskah Akademik (NA), Konsideran dan Penjelasan Pasal UU Nomor 11 Tahun 2020 juncto UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tidak ditemukan dasar atau alasan ancaman pemberian sanksi administrasi kepada pelaku pembalakan liar yang tinggal atau berada di sekitar kawasan hutan, sehingga adanya pengaturan sanksi administrasi tersebut tidak sesuai dengan asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan tidak sesuai adanya pengaturan sanksi administrasi dengan tujuan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 juncto UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kedua, Mengingat kerusakan hutan semakin parah yang salah satunya diakibatkan dari perambahan hutan secara liar, maka sudah saatnya kedudukan sanksi pidana tetap diancam setelah sanksi administrasi gagal memberikan efek jera dalam tindak pidana kehutanan (ultimum remedium) Sanksi pidana tetap diperlukan bagi pelaku pembalakan liar, baik yang tinggal di hutan maupun di diluar kawasan hutan, karena siapa pun pelaku/subyek perambahan liar, sama-sama memberikan kerusakan dan dampak, bukan saja bagi hutan tapi berdampak terhadap lingkungan secara luas.

SIAGIAN, HOTNER. 2023 “Illegal Logging Crimes Committed by Community Groups Living in Forest Areas in the Perspective of the Job Creation Law”. Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. and Advisor II: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. 140 Pages.

ABSTRACT

Keywords: Criminal, Illegal Logging, Job Creation Law.

The purpose of the thesis research entitled Crime of Illegal Logging Committed by Community Groups Living in Forest Areas in the Perspective of the Job Creation Law is to find out and analyze the basis/urgency for illegal loggers living in forest areas to be subject to administrative sanctions as well as to find out and analyze policies formulation to ensnare illegal loggers living in forest areas. The type of research that the author uses is normative legal research, namely research that aims to analyze laws and regulations regarding the basis/urgency for illegal loggers living in forest areas to be subject to administrative sanctions.

*The research results obtained are **First**, in the Academic Document (NA), Preamble and Explanation of Article Law Number 11 of 2020 junto Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation there is no basis or reason for threats of imposing administrative sanctions on illegal loggers who live or are in around forest areas, so that the arrangement of administrative sanctions is not in accordance with the principle of clarity of purpose in forming laws and regulations, and is not in accordance with the arrangement of administrative sanctions with the aim of establishing Law Number 11 of 2020 in conjunction with Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. **Second**, given that forest damage is getting worse, one of which is the result of illegal encroachment on the forest, it is time for the position of criminal sanctions to remain threatened after administrative sanctions fail to provide a deterrent effect in forestry crimes (*ultimum remedium*). Criminal sanctions are still needed for perpetrators of illegal logging, both who live in the forest or outside the forest area, because whoever the actor/subject of illegal encroachment, is equally causing damage and impact, not only for the forest but for the environment in general.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih, rahmat, karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK MASYARAKAT YANG TINGGAL DIKAWASAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA.**

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Pembimbing Utama dalam Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
3. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
4. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. Bapak Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. selaku Tim

Penguji yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini

5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;
6. Rekan-rekan satu angkatan 2021 dan teman-teman dari Kepolisian Polres Kapuas, atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis

Hotner Siagian

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Keaslian Penelitian.....	15
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	20
E. Tinjauan Pustaka.....	21
F. Metode Penelitian.....	70
G. Pertanggungjawaban Sistematis.....	73
BAB II LANDASAN/URGENSI PELAKU PEMBALAKAN LIAR YANG TINGGAL DIKAWASAN HUTAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI	
A. Konsep Sanksi Administrasi	75
B. Sanksi Administrasi dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	86
C. Landasan/Urgensi Pelaku Pembalakan Liar yang Tinggal di Kawasan Hutan di Kenakan Sanksi Administrasi	94
BAB III KEBIJAKAN FORMULASI UNTUK MEMBERIKAN SANKSI PIDANA KEPADA PELAKU PEMBALAKAN LIAR YANG TINGGAL DIKAWASAN HUTAN	
A. Kedudukan Sanksi Pidana yang Bersifat Administrasi Dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ..	119
B. Alasan Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembalakan Liar yang Tinggal di Kawasan Hutan	123
C. Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pembalakan Liar yang Tinggal di Kawasan Hutan	131
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	